

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1565 K/10/MEM/2008

TENTANG

**IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO)**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Membaca** : 1. Surat Direktur Utama PT PERTAMINA (Persero) Nomor 1561/C00000/2005-S tanggal 30 Desember 2005, Nomor 268/C00000/2007-S0 tanggal 9 Maret 2007 dan Nomor 056/C00000/2008-S0 tanggal 16 Januari 2008;
2. Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 17692/24/DJM/2006 tanggal 13 Desember 2006 dan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 2386/SDM/2008 tanggal 12 Februari 2008;
- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, PT PERTAMINA (Persero) dianggap telah mendapatkan Izin Usaha untuk usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan kepastian hukum bagi PT PERTAMINA (Persero) dalam melakukan kegiatan usaha pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi, perlu menetapkan Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk PT PERTAMINA (Persero) dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara RI Nomor 1 Tahun 2005);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4253);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 69);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tanggal 21 April 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG IZIN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO).

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi kepada :

Nama Badan Usaha : PT PERTAMINA (Persero)
Direktur Utama/Penanggung jawab : Ari H Sumarno
NPWP : 01.001.664.0-051.000
Alamat Badan Usaha : Jl. Medan Merdeka Timur 1A
Jakarta

KEDUA : Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan untuk kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, LNG, LPG, Bahan Bakar Lain dan hasil olahannya termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dengan fasilitas dan sarana pengangkutan sebagai berikut :

- a. Fasilitas dan sarana pengangkutan darat dan fasilitas dan sarana pengangkutan laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini;
- b. Fasilitas dan sarana jaringan pipa transmisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, PT PERTAMINA (Persero) wajib :

- a. memenuhi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjamin dan bertanggungjawab atas standar dan mutu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. menjamin dan bertanggungjawab atas penggunaan peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan sesuai standar, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjamin keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat setempat serta menggunakan kaidah keteknikan yang baik;
- e. melaksanakan penunjukan/penugasan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka penyediaan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional untuk pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri sesuai jenis dan standar mutu yang ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. memberikan kesempatan kepada Badan Usaha lain untuk secara bersama memanfaatkan fasilitas dan sarana pengangkutan gas bumi melalui pipa yang dimilikinya dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis;
- g. melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai perubahan fasilitas dan sarana kegiatan Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang mengakibatkan penambahan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas awal;
- h. mengajukan permohonan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai penyesuaian Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk penambahan kapasitas lebih dari 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas awal;
- i. menyampaikan laporan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap 1 (satu) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan khusus untuk Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa disampaikan tembusan kepada Badan Pengatur;
- j. bersedia dilakukan inspeksi lapangan secara berkala ataupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT

- a. Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri ini;

- b. Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi tidak merupakan usaha monopoli;
- c. Izin Usaha Pengangkutan Minyak Bumi dan Gas Bumi ini dapat diperpanjang dan permohonan perpanjangan diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Usaha berakhir.

KELIMA : Terhadap PT PERTAMINA (Persero) dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan kegiatan, pembekuan kegiatan dan pencabutan Izin Usaha apabila :

- a. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. tidak mematuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan;
- c. tidak memenuhi kesanggupan sebagaimana yang telah ditentukan.

KEENAM : a. Dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan mempertimbangkan kebijakan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha PT PERTAMINA (Persero), Izin Usaha ini dapat dialihkan kepada anak perusahaan dengan persyaratan kepemilikan saham PT PERTAMINA (Persero) paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen).

b. Dalam hal PT PERTAMINA (Persero) mengalihkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada anak perusahaan penerima Izin Usaha wajib mendapatkan Izin Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pengalihan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kepemilikan, penguasaan dan/atau pengoperasian fasilitas dan sarana pengangkutan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala Badan Pengatur
5. Direktur Utama PT PERTAMINA (Persero)

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 1565 K/10/MEM/2008
 TANGGAL : 21 April 2008

**FASILITAS DAN SARANA PENGANGKUTAN DARAT
 BAHAN BAKAR MINYAK (MOBIL TANGKI)**

| No. | NAMA BADAN USAHA/PERUSAHAAN | NO. POLISI | KAP (KL) | JENIS BBM YG DIANGKUT | TRAYEK/DAERAH OPERASI |
|-----|-----------------------------|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | B 9262 PQ | 16 | BBM | JABODETABEK |
| 2 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | B 9263 PQ | 16 | BBM | JABODETABEK |
| 3 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | B 9264 PQ | 16 | BBM | JABODETABEK |
| 4 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | B 9266 PQ | 16 | BBM | JABODETABEK |
| 5 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | B 9267 PQ | 16 | BBM | JABODETABEK |
| 6 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | B 9268 PQ | 16 | BBM | JABODETABEK |
| 7 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | B 9269 PQ | 16 | BBM | JABODETABEK |
| 8 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | B 9270 PQ | 16 | BBM | JABODETABEK |
| 9 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | B 9271 PQ | 16 | BBM | JABODETABEK |
| 10 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | B 9272 PQ | 24 | BBM | JABODETABEK |
| 11 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | B 9273 PQ | 24 | BBM | JABODETABEK |
| 12 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | B 9274 PQ | 24 | BBM | JABODETABEK |
| 13 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | B 9275 PQ | 24 | BBM | JABODETABEK |
| 14 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | B 9276 PQ | 24 | BBM | JABODETABEK |
| 15 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | B 9277 PQ | 24 | BBM | JABODETABEK |
| 16 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | B 9278 PQ | 24 | BBM | JABODETABEK |
| 17 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | B 9279 PQ | 24 | BBM | JABODETABEK |
| 18 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | B 9280 PQ | 24 | BBM | JABODETABEK |
| 19 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | B 9281 PQ | 24 | BBM | JABODETABEK |
| 20 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | B 9637 QC | 40 | BBM | JABODETABEK |
| 21 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | BM 9100 LH | 8 | BBM | BATUAMPAR |
| 22 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | H 9310 KW | 16 | BBM | SEMARANG |
| 23 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | H 9311 KW | 16 | BBM | SEMARANG |
| 24 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | H 9328 KW | 16 | BBM | SEMARANG |
| 25 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | H 9329 KW | 16 | BBM | SEMARANG |
| 26 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | H 9315 KW | 16 | BBM | REWULU |
| 27 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | H 9316 KW | 16 | BBM | REWULU |
| 28 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | H 9317 KW | 16 | BBM | REWULU |
| 29 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | H 9319 KW | 16 | BBM | REWULU |
| 30 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | H 9320 KW | 16 | BBM | REWULU |
| 31 | PT. PERTAMINA (PERSERO) | H 9325 KW | 16 | BBM | REWULU |

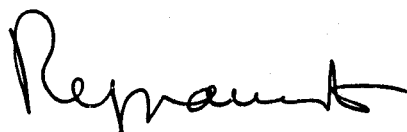
FASILITAS DAN SARANA PENGANGKUTAN DARAT MELALUI PIPA

| No. | JALUR | PANJANG (KM) |
|-----|-----------------------|--------------|
| 1 | Cilacap - Yogyakarta | 180 |
| 2 | Yogyakarta - Boyolali | 66 |
| 3 | Cilacap - Bandung | 250 |
| 4 | Balongan - Jakarta | 210 |
| 5 | Plaju - Kertapati | 13 |

FASILITAS DAN SARANA PENGANGKUTAN LAUT

| STATUS KAPAL | JENIS KOMODITAS | JUMLAH KAPAL | KAPASITAS (DWT) |
|-------------------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Kapal Milik | Minyak Bumi | 5 | 307,000 |
| | Bahan Bakar Minyak | 31 | 436,900 |
| | Hasil Olahan | 0 | 0 |
| | LPG | 0 | 0 |
| Kapal Charter (TC & LTTC) | Minyak Bumi | 17 | 1,162,000 |
| | Bahan Bakar Minyak | 66 | 1,204,128 |
| | Hasil Olahan | 7 | 40,830 |
| | LPG | 7 | 57,242 |
| Total (tidak termasuk Satgas) | | 130 | 3,128,100 |
| Satgas | BBM | 19 | 18,208 |
| | | | |
| Total | | 149 | 3,146,308 |

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


PURNOMO YUSGIANTORO

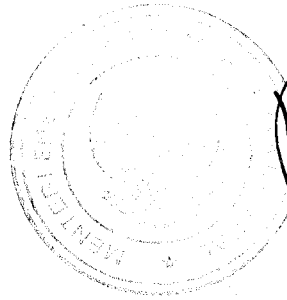
LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 1565 K/10/MEM/2008
 TANGGAL : 21 April 2008

FASILITAS DAN SARANA JARINGAN PIPA TRANSMISI

| NO. | JALUR | KAB/KOTA | EXISTING | | | | KAPASITAS (MMSCFD) | UTILISASI (MMSCFD) |
|---|--|--------------------|----------|-------|--------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | (INCHI) | (KM) | ROW | KELAS LOKASI | | |
| A. NANGROE ACEH DARUSSALAM (NAD) | | | | | | | | |
| 1 | Point B - PIM | Aceh Utara | 14 | 6 | 15 | 1 - 4 | 160 | 60 |
| 2 | PIM - AAF | Aceh Utara | 14 | 2 | 15 | 1 - 4 | 70 | 10 |
| 3 | AAF-KKA | Aceh Utara | 8 | 13,5 | 15 | 1 - 4 | 20 | 10 |
| B. SUMATERA UTARA (SUMUT) | | | | | | | | |
| 1 | Paluh Tabuhan Barat - P. Batu | Langkat/SBU | 6 | 4 | 20 | 1 - 4 | 10 | 9 |
| 2 | Paluh Tabuhan Timur - P. Batu | Langkat/SBU | 8 | 7 | 15 | 1 - 4 | 10 | 3 |
| 3 | Paluh Tabuhan Timur - P. Batu | Langkat/SBU | 8 | 7 | 15 | 1 - 4 | 10 | 0 |
| 4 | P. Batu - P. Brandan | Langkat/SBU | 14 | 6,5 | 15 | 1 - 4 | 30 | 13 |
| 5 | Gebang - P. Brandan | Langkat/SBU | 8 | 6,5 | 15 | 1 - 4 | 10 | 0 |
| 6 | Gebang - P. Brandan | Langkat/SBU | 6 | 8,8 | 15 | 1 - 4 | 6 | 0 |
| 7 | Gebang - P. Brandan | Langkat/SBU | 8 | 12,4 | 15 | 1 - 4 | 10 | 4 |
| 8 | P. Brandan - Wampu | Langkat/SBU | 12 | 52,2 | 15 | 1 - 4 | 25 | 0 |
| 9 | P. Brandan - Wampu | Langkat/SBU | 18 | 52,2 | 15 | 1 - 4 | 110 | 17 |
| C. SUMATERA SELATAN (SUMSEL) | | | | | | | | |
| 1 | Musi - Teras | Musi Banyuasin | 12 | 37 | 20 | 1 - 4 | 60 | 60 |
| 2 | Teras - Rambutan | Musi Banyuasin | 14 | 23,76 | 20 | 1 - 4 | 60 | 60 |
| 3 | Rambutan - Bitung | Musi Banyuasin | 16 | 20 | 20 | 1 - 4 | 120 | 120 |
| 4 | Betung - Prabumulih | Musi Banyuasin | 20 | 38 | 20 | 1 - 4 | 150 | 150 |
| 5 | Prabumulih - Cambai | Prabumulih | 12 | 10,1 | 20 | 1 - 4 | 60 | 60 |
| 6 | Prabumulih - Cambai | Prabumulih | 14 | 10,1 | 20 | 1 - 4 | 220 | 220 |
| 7 | Cambai - Simpang Y | Ogan Komering Ilir | 14 | 59 | 30 | 1 - 4 | 60 | 60 |
| 8 | Cambai - Simpang Y | Ogan Komering Ilir | 20 | 59 | 30 | 1 - 4 | 100 | 100 |
| 9 | Cambai - Simpang Y | Ogan Komering Ilir | 20 | 59 | 20 | 1 - 4 | 100 | 100 |
| 10 | Lembak - Simbang Y | Ogan Komering Ilir | 14 | 52,5 | 30 | 1 - 4 | 60 | 60 |
| 11 | Simpang Y - P. Layang | Palembang | 24 | 20 | 20 | 1 - 4 | 300 | 300 |
| 12 | Simpang Y - P. Pusri | Palembang | 22 | 18,5 | 20 | 1 - 4 | 250 | 250 |
| 13 | L. Barat - Prabumulih | Musi Banyuasin | 12 | 10 | 20 | 1 - 4 | 60 | 60 |
| 14 | L. Barat - Prabumulih | Musi Banyuasin | 12 | 8 | 20 | 1 - 4 | 60 | 60 |
| 15 | G. Kemala - P. Barat | Musi Banyuasin | 8 | 11 | 30 | 1 - 4 | 20 | 20 |
| 16 | Pengabuan - Cambai | Prabumulih | 6 | 20 | 20 | 1 - 4 | 60 | 60 |
| 17 | Pengabuan - Simpang Y | Ogan Komering Ilir | 8 | 88 | 20 | 1 - 4 | 20 | 20 |
| 18 | SP Musi Barat - P3 Prabumulih Barat | Prabumulih | 25 | 136,2 | 25 | 1 - 4 | | |
| D. JAWA BARAT (JABAR) | | | | | | | | |
| 1 | SKG Mundu - PLTG Sunyaragi | Indramayu | 8 | 32 | 20 | 2, 3 | 30 | 6 |
| 2 | Mundu - Balongan | Indramayu | 12 | 18 | 30 | 1, 2, 3 | 90 | 12 |
| 3 | MS Balongan - SKG KHT | Indramayu | 14 | 34 | 20 | 2 | 100 | 10 |
| 4 | KHT - Cilamaya | Indramayu | 14 | 59 | 20 | 2 | 90 | 0 |
| 5 | KHT - Cilamaya | Indramayu | 18 | 59 | 20 | 2 | 150 | 15 |
| 6 | SKG Cilamaya - Citarik | Karawang | 18 | 21 | 20 | 2 | 250 | 20 |
| 7 | SKG Cilamaya - Citarik | Karawang | 24 | 21 | 20 | 2 | 350 | 175 |
| 8 | Citarik - Tegalgede | Bekasi, Karawang | 32 | 45 | 20 | 2 | 450 | 210 |
| 9 | Citarik - Tegalgede | Bekasi, Karawang | 24 | 45 | 20 | 2 | 350 | 150 |
| 10 | Citarik - Tegalgede | Bekasi, Karawang | 18 | 45 | 20 | 2 | 160 | 20 |
| 11 | Tegalgede - Nagrak | Bekasi | 24 | 27 | 20 | 3 | 270 | 155 |
| 12 | Tegalgede - Nagrak | Bekasi | 10 | 27 | 20 | 3 | 70 | 13 |
| 13 | Nagrak - Bitung | Tangerang | 24 | 51 | 20, 40 | 3 & 4 | 270 | 155 |
| 14 | Bitung - MS Cilegon | Tangerang | 24 | 72 | 20, 40 | 2, 3 & 4 | 270 | 90 |

| NO. | JALUR | KAB/KOTA | EXISTING | | | | KAPASITAS (MMSCFD) | UTILISASI (MMSCFD) |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------|--------|-------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | (INCHI) | (KM) | ROW | KELAS LOKASI | | |
| E. JAWA TIMUR (JATIM) | | | | | | | | |
| 1 | Pagerungan - ORF Porong | Sumenep - Sidoarjo | 28 | 369,70 | 20 | Offshore | 600 | 130 |
| 2 | ORF Porong - Stasiun Gas Gresik | Sidoarjo-Gresik | 28 | 52,64 | 1 - 3 | 1 - 4 | 600 | 110 |
| 3 | Stasiun Gas Gresik - PLN Gresik | Gresik | 24 | 3,42 | 1,5 | 1 - 4 | 300 | 0 |
| 4 | Stasiun Gas PPB Gresik - PKG Gresik | Gresik | 10 | 4,65 | 1,5 | 1 - 4 | 50 | 20 |
| F. KALIMANTAN TIMUR (KALTIM) | | | | | | | | |
| 1 | Tanjung Santan - SKG Bontang | Kukar | 16 | 39,7 | 20 | 1 - 4 | 200 | 115 |
| 2 | KM 53 - SKG Bontang | Bontang | 16 | 13 | 20 | 1 - 4 | 200 | 135 |
| 3 | Tanjung Santan - Manifold KM 29 | Kukar | 16 | 3,2 | 20 | 1 - 4 | 200 | 90 |

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



Purnomo Yusgiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO